

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, Negara Republik Rakyat Tiongkok atau disebut Tiongkok menentang sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan untuk menempatkan sebuah sistem pertahanan rudal bernama Terminal High Altitude Area Defense disingkat dengan THAAD dalam wilayah Negaranya. Penentangan dan sikap kontra dari Tiongkok menyebabkan terjadinya persetujuan hubungan diplomatik Tiongkok dengan Korea Selatan. Terlebih lagi saat Tiongkok membalas Korea Selatan dengan memberikan sanksi ekonomi sebagai strateginya untuk memenuhi kepentingannya Negaranya, yang mana dalam isu THAAD ini untuk mendorong Korea Selatan membatalkan kebijakan penempatan sistem THAAD tersebut.

Dalam BAB Pendahuluan ini, menjelaskan secara singkat latar belakang terjadinya konflik antara Tiongkok dengan Korea Selatan. Diawali dari awal mula penepatan kebijakan penempatan THAAD, kemudian sikap kontra yang diberikan oleh Tiongkok yang mendorongnya untuk membalas Korea Selatan dengan Sanksi ekonomi sehingga menciptakan suatu rumusan masalah yang akan di jelaskan dengan bantuan Teori dan konsep yang sesuai.

A. Latar Belakang Masalah

Republik Raykat Tiongkok (RRT) yang seterusnya disebut Tiongkok, merupakan Negara terbesar di Asia. Dalam perjalanannya untuk tumbuh menjadi Negara dengan kekuatan global yang besar dan kuat dan memiliki

peran penting dalam tatanan global, Tiongkok dihadapi dengan perubahan luar biasa dalam lingkungan internal dan eksternal dan bertemu dengan berbagai masalah dan tantangan dalam memenuhi tujuannya. Mengingat situasi tersebut, Tiongkok kerap mengubah pemikiran strategisnya sesuai dengan kondisi atau isu yang dialaminya. Tiongkok juga secara tidak langsung ingin Negara-Negara lain melihat bahwa Tiongkok memiliki kemampuan untuk menghukum Negara yang berkonflik dengannya. Presiden Xi telah menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinannya yang berkelanjutan, Tiongkok akan mengambil sikap yang tegas di luar negeri, dengan menunjukkan kepada audiensi politik internasional bahwa Tiongkok dapat bertindak untuk menghukum negara yang gagal memenuhi keinginan Negeranya.

Sebagai Negara yang berperan aktif dalam dunia internasional serta dilengkapi dengan perekonomian yang besar dan kapabilitas militer yang terus berkembang. Tiongkok memiliki posisi sebagai Negara yang mampu menggunakan kekuatannya tersebut sebagai senjata untuk melindungi kepentingannya dan tidak bisa diremehkan apabila Tiongkok sudah mengambil tindakan demi kepentingan Negeranya. Tiongkok merupakan Negara yang menjunjung tinggi perdamaian, dalam Negara maupun dalam lingkungan Internasional. Sehingga Tiongkok cenderung menghindari tindakan yang menciptakan konfrontasi ataupun kekerasan, akan tetapi Tiongkok akan mengambil tindakan yang sesuai apabila terjadi konflik dengan Negara lain yang dapat merusak perdamaian bagi Negeranya. Seperti yang dirasakan Tiongkok pada tahun 2016, yang mana terjadi perselisihan antara Tiongkok

dengan Negara tetangganya yaitu Korea Selatan yang menyebabkan adanya perseteruan hubungan diplomatik.

Hubungan Tiongkok dengan Korea Selatan merupakan hubungan bilateral yang sudah lama dijalin oleh kedua Negara. Normalisasi hubungan keduanya pada tahun 1992 merupakan titik balik dari hubungan buruk yang hampir empat puluh tahun ada di kedua negara pasca perang Korea dikarenakan keterlibatan Tiongkok dalam membantu agresi Korea Utara pada masa perang Korea. Normalisasi ini membawa kedua negara kedalam hubungan yang lebih serius dengan tujuan saling menguntungkan keduanya, hal tersebut menjadikan kedua negara sebagai rekan dalam hubungan diplomatik (Habiburrahman, 2017, p. 3). Selama 12 tahun, sejak tahun 1992, kedua negara telah membina hubungan diplomatik melalui program pertukaran dan kerjasama. Hubungan kedua negara semakin tahun menjadi semakin penting untuk kedua belah pihak. Seoul dan Beijing telah saling memandang satu sama lain sebagai mitra yang sangat penting dalam aspek perdagangan, investasi, teknologi, pariwisata, dan pertukaran budaya dan pendidikan. Kondisi wilayah yang berdekatan dan kedekatan ras membuat hubungan diplomatik kedua Negara semakin erat. Akan tetapi perselisihan antar kedua Negara yang terjadi pada tahun 2016, menyebabkan hubungan erat tersebut mengalami kerenggangan.

Perselisihan tersebut berawal dari masalah nuklir Korea Utara. Pengembangan senjata nuklir dan kemampuan rudal balistik Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan, menyebabkan Seoul untuk mengejar kebijakan keamanan yang lebih agresif. Diawali dari keputusan Seoul untuk

meningkatkan kerjasamanya dengan Jepang dan sekutu lain Amerika Serikat atau disingkat sebagai AS. Tiongkok, terkait kasus nuklir Korea Utara sama seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, memiliki kepentingan yang sama yaitu denuklirisasi Korea Utara. Namun, Tiongkok yang diketahui menganggap AS sebagai saingannya dalam *global power* tampak kurang peduli dengan tujuan tersebut dan lebih fokus terhadap mencegah Korea Selatan menjalin hubungan aliansi yang lebih dalam terhadap AS dan sekutunya yang dikhawatirkan Tiongkok dapat mengguncang stabilitas regional. Sebaliknya, Seoul telah memberikan prioritas utama untuk denuklirisasi Korea Utara dan memperkuat hubungannya dengan sekutunya pada saat bahaya besar. Amerika Serikat yang juga memandang nuklir Korea Utara sebagai ancaman, mengambil kesempatan ini untuk mengajak Korea Selatan menjalin persekutuan dengan meningkatkan kerja sama Militer, dalam hal ini dengan keputusan untuk menggunakan sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense*, yang dikenal sebagai THAAD milik Amerika Serikat untuk mempertahankan diri dari ancaman nuklir Korea Utara (McGuire, 2018).

Pada tanggal 7 Februari 2016, para pejabat militer Korea Selatan dan Amerika mengumumkan bahwa pemerintah kedua Negara telah memulai pembicaraan mengenai kemungkinan penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan, sistem yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik atau Nuklir (Liang Fook, 2017). Pada awalnya Korea Selatan menolak sistem tersebut karena kontroversi yang mengakibatkan banyaknya oposisi, namun setelah berbulan-bulan di bicarakan dan melihat peningkatan ancaman

keamanan yang ditimbulkan oleh pengembangan rudal Korea Utara hal tersebut mengubah pandangan pemerintah Korea Selatan terhadap THAAD. Akhirnya 7 Juli 2016, Departemen Pertahanan AS dan Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengumumkan dalam pernyataan bersama yaitu keputusan aliansi setuju untuk menempatkan sistem THAAD di Korea Selatan (Ethan Meick, 2017, p. 4). Kebijakan Korea Selatan untuk menggunakan THAAD di setuju demi mempertahankan kekuatan militer dan memperkuat pertahanan negaranya melawan Korea Utara.

Akan tetapi, Tiongkok tidak menyambut baik kebijakan penggunaan THAAD oleh Korea Selatan tersebut. Hal tersebut tercermin dari penyampaian Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, setelah Korea Selatan resmi mengumumkan keputusannya tersebut. Wang Yi mengatakan, "Cakupan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan, terutama ruang lingkup pemantauan radarnya, jauh melampaui kebutuhan pertahanan korea selatan dan malah akan mencapai jauh ke pedalaman Asia, yang akan langsung merusak kepentingan keamanan strategis Tiongkok." (Ethan Meick, 2017, p. 4). Duta Besar Tiongkok Qiu Guohong juga telah memperingatkan bahwa penggunaan THAAD dapat "menghancurkan" hubungan Tiongkok-Korea Selatan dalam sekejap, namun respon dari Korea Selatan yang diwakili oleh juru bicara presiden Korea Selatan, Jung Youn-ku keluar sebagai peringatan terhadap Tiongkok bahwa menyebarkan THAAD adalah "masalah yang akan kami putuskan sesuai dengan keamanan dan kepentingan nasional sendiri." (Tiezzi, China Warns THAAD Deployment Could Destroy South Korea Ties 'in an

Instant'. The Diplomat, 2016). Respon tersebut menambah pandangan negatif pemerintah Tiongkok terhadap kebijakan THAAD. Tekanan diplomatik semakin memanas setelah AS-Korea Selatan bersatu mengumumkan secara resmi akan memulai operasi pemasangan sistem THAAD di Korea Utara pada 8 Juli 2016. Presiden Tiongkok, Xi Jinping juga mengangkat keberatannya akan penggunaan sistem THAAD dengan rekannya dari Korea Selatan di sela-sela KTT G20 di Hangzhou pada bulan September 2016 (Liang Fook, 2017).

Tiongkok memiliki beberapa alasan yang mendasari diambilnya sikap kontra terhadap kebijakan penggunaan sistem THAAD ini. Tiongkok, melihat THAAD sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negaranya. Tiongkok juga mengklaim bahwa THAAD akan merusak kemampuan pencegah nuklir Negara Tiongkok itu sendiri. Tiongkok yang juga sejak awal merespon negatif terhadap hubungan aliansi antara Korea Selatan dengan AS, Khawatir adanya THAAD sebagai sistem yang dikembangkan oleh Amerika Serikat bukan hanya sekedar langkah defensif AS untuk mempertahankan diri dari ancaman Korea Utara namun juga sebagai niat untuk mengancam kepentingan keamanan Tiongkok, Tiongkok terus menyatakan ketidakpuasannya atas keputusan Korea Selatan karena kekhawatirannya THAAD akan mengancam keamanan nasional negara bahwa penggunaan THAAD mungkin menjadi rencana oleh AS untuk membidik Tiongkok. Pemerintahan Beijing, juga mengklaim bahwa radar sistem dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk memata-matai Tiongkok (Volodzko, 2017). Dimana sistem radar THAAD dapat mengumpulkan data-data dikisaran jarak

hingga 2.000 km yang dimana mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok. (Chris Inton, 2017).

Dalam pernyataannya terkait dengan ancaman – ancaman yang ditimbulkan dengan adanya THAAD, Tiongkok telah melakukan segala bentuk protes, menunjukkan oposisi yang kuat terhadap kebijakan tersebut sejak awal di umulkannya diskusi penggunaan THAAD oleh Korea Selatan dengan Amerika Serikat, namun setelah protes dan oposisi yang di tunjukan tidak memberikan perubahan terhadap keputusan Korea Selatan akan THAAD Tiongkok pun kemudian mengancam, akan memberikan aksi yang sesuai dengan pernyataan mereka bahwa akan mengambil tindakan-tindakan terkait penentangan terhadap THAAD jika Korea Selatan tidak membatalkan kebijakannya dalam menggunakan sistem THAAD tersebut (Habiburrahman, 2017, p. 11). Sebagai Negara yang dilengkapi dengan kekuatan ekonomi dan kemampuan militer lebih, dibuktikan dengan adanya fakta kehadiran Tiongkok sebagai aktor ekonomi terbesar dunia (world's largest economy) juga aktor militer kuat (strong military actor) yang tidak terbantahkan (Roy, 1998). Dengan *power* yang dimilikinya, Tiongkok dapat menunjukkan kerugian yang akan didapatkan Korea Selatan jika hubungan bilateral kedua Negara tidak dijaga.

Tiongkok merupakan Negara yang sangat membela kepentingan nasionalnya dan tidak takut untuk menghukum mereka yang merugikan kepentingan negaranya (Lee B. , 2017). Demikian dalam strateginya memperjuangkan kepentingannya untuk menggagalkan THAAD, Tiongkok

bisa saja menekan pemerintah Korea Selatan dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Tiongkok tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatan militernya. Kemajuan dan kemampuan teknis militer Tiongkok sangatlah luar biasa, dapat dilihat dari Kapasitas militer yang dimiliki Tiongkok, berbagai jenis peralatan militer modern baik di bidang armada darat, udara, maupun laut (Marcus, 2018). Tiongkok juga memiliki senjata Nuklir yang perlu diwaspadai, rudal balistik konvensional, jet tempur generasi kelima, pasukan *drone* jarak jauh yang mematikan. Mengukur kekuatan militer Tiongkok juga dapat tinjau dari alokasi anggaran militer Tiongkok (Peck, 2018). Alokasi anggaran pertahanan yang disediakan Tiongkok tiga kali lebih banyak dari India dan lebih besar dari kombinasi belanja militer Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam. Dengan kekuatan militer tersebut, Tiongkok terbukti mampu memberikan tekanan militer untuk membalas kebijakan THAAD dan menekan Korea Selatan. Namun ketimbang menggunakan kekuatan militernya, Tiongkok lebih memilih menetapkan sanksi ekonomi sebagai strateginya terhadap kebijakan THAAD Korea Selatan (Setiawan, 2017).

Sanksi Ekonomi adalah tindakan yang diambil oleh satu Negara sebagai kebijakan luar Negerinya untuk menekan ekonomi Negara lain, seringkali untuk memaksa perubahan politik Negara yang dituju tersebut. Melalui Sanksi Ekonomi Tiongkok mulai menerapkan taktik penekanan terhadap Korea Selatan, diawali pada September 2016, Tiongkok mulai melarang segala jenis *entertainment* asal Korea Selatan dalam Negara, yang mana membatalkan

menampilkan musik Korea , melarang masuknya bintang televisi asal Korea Selatan tanpa adanya penjelasan , terlebih lagi Tiongkok menarik semua bintang televisi negaranya yang sedang beraktivitas di Korea Selatan dan pada Januari 2017, Tiongkok mulai melarang segala jenis penjualan musik pop Korean (Kpop) dalam Negara serta pembatalan penampilan seniman-seniman asal Korea Selatan di Tiongkok yang kemudian di gantikan dengan seniman dalam negeri. Kemudian pada bulan yang sama, adanya larangan masuk kosmetik dan barang-barang makanan Korea Selatan. Pada Maret 2017, Tiongkok melarang penjualan semua video game online asal Korea Selatan, pada bulan yang sama juga Tiongkok memberhentikan penjual-belian mobil asal Korea Selatan yaitu Hyundai dan Kia. Setelah itu Tiongkok juga melarang segala aktifitas yang berhubungan dengan *Tourism*, Tiongkok tidak mengizinkan penerbangan pesawat antara kedua Negara dan pada Juni 2017, Tiongkok menghentikan Agensi *Travel* untuk mengirim paket tur ke Korea Selatan (Ethan Meick, 2017).

Terlebih lagi Lotte Grup yang merupakan perusahaan asing terbesar milik Korea Selatan di Tiongkok ditutup sementara oleh pemerintah Tiongkok (Hutchinson, 2016, p. 15). Tiongkok mulai mengambil langkah penutupan Perusahaan Lotte pada bulan Februari dan Maret 2017, berdasarkan data perusahaan yang diliput oleh Yonhap News, 90% dari 99 toko penyalur Lotte Mart di Tiongkok berhenti beroperasi, 74 diantaranya ditutup paksa dengan alasan inspeksi, 13 lainnya dikarenakan adanya tekanan dari gerakan anti-korea (Habiburrahman, 2017, p. 11). Melalui tindakan-tindakan dan tekanan sanksi

ekonomi tersebut Tiongkok berusaha mempengaruhi Korea Selatan untuk mempertimbangkan keputusannya atas penempatan sistem THAAD.

Dengan melihat pilihan strategi Tiongkok tersebut, tentu Tiongkok memiliki alasan kuat yang mendorongnya untuk memilih sanksi ekonomi sebagai strateginya dalam memperjuangkan kepentingannya ketimbang menggunakan kekuatan militernya, walaupun Tiongkok memiliki kekuatan militer yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini adalah “Mengapa Tiongkok memilih Sanksi Ekonomi sebagai strateginya dalam merespon kebijakan penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan?”

C. Kerangka Teoritis

Guna menjelaskan rumusan masalah diatas penulis akan menggunakan *Foreign policy* dan *Rational Choice Theory* dalam menganalisis penelitian ini.

1. Foreign Policy

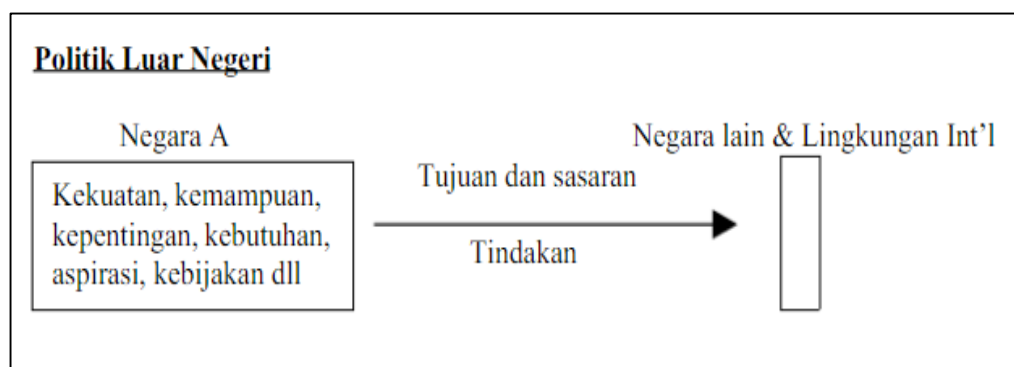
Dalam hubungan internasional, *Foreign policy* atau Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (Decision Maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Jack C. Plano, 1999). Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mark R. Amstutz: “*Foreign policy as explicit and implicit*

actions of governmental officials designed to promote national interest beyond a country's territorial boundaries."

Berdasarkan definisi di atas politik luar negeri merupakan alat untuk memenuhi kepentingan nasional (Amstutz, 1998). Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan yang terdiri dari pilihan- pilihan yang ada dengan mempertimbangkan konsekuensi – konsekuensinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Graham T Allison: “*Governments select the action that will maximize strategic goals and objectives.*”

Berdasarkan definisi diatas, pemerintah Negara harus memilih tindakan yang diyakini bisa memenuhi kepentingan nasional secara maksimal (Allison, 1971, p. 32). Kemudian menurut Marijke Breuning dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* menjelaskan bahwa, politik luar negeri memiliki dua unsur, yakni tujuan dari tindakan yang diambil dan instrumen yang akan digunakan.

Gambar 1: Konsep Politik Luar Negeri



Sumber: Breuning (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Methods*.

Berdasarkan gambar diatas, tujuan dan tindakan merefleksikan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara. Sedangkan unsur yang kedua adalah penggunaan instrumen dengan mempertimbangkan kemampuan atau kekuatas yang dimiliki Negaranya untuk mencapai tujuan. (Breuning, 2007).

Berdasarkan penjelasan konsep tersebut bisa di aplikasikan, Tiongkok memandang adanya THAAD di Korea Selatan dapat mengancam kepentingan keamanan negaranya, demikian untuk melindungi diri dari ancaman tersebut, Tiongkok pun mengeluarkan strategi atau tindakan untuk menekan Korea Selatan, yang mana bertujuan untuk mempengaruhi Korea Selatan agar membatalkan kebijakan penanaman sistem THAAD dalam Negaranya. Dalam strateginya ada dua pilihan instrumen yang bisa Tiongkok gunakan untuk mencapai tujuannya, yaitu kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Yang mana dalam bentuk sanksi ekonomi dan aksi militer.

2. *Rational Choice Theory*

Penjelasan bahwa politik luar negeri suatu negara harus dapat memenuhi kepentingan nasional Negaranya secara maksimal menjadikan negara atau pemerintah sebagai aktor rasional. Robert Dahl dan Charles Linblom mendefinisikan aktor rasional sebagai:

“Suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan

tentang tujuan itu dengan kenyataan tindakan itu dilakukan (Rosenau, 1976).”

Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional yang mana menomorsatukan survivalitas dan kesejahteraan dalam setiap tindakannya akan memilih tindakan yang paling menguntungkan dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai hal tersebut, Negara akan melihat pilihan yang dianggap memaksimalkan keuntungan (*benefit*) dan meminimalkan kerugian (*cost*) yang diterima (Allison, 1971, p. 33). Untuk menganalisis *Benefit* dan *Cost* yang diterima oleh Negara, Penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional. Menurut Kegley, teori pilihan rasional merupakan sebuah cara pengambilan keputusan yang didasari oleh pertimbangan mengenai untung-rugi dalam rangka mengarahkan keputusan kepada alternatif kebijakan yang mempunyai potensi terbesar untuk mencapai tujuan tertinggi (Kegley, 2011).

Menurut teori ini aktor akan berusaha untuk membuat keputusan yang dapat memaksimalkan atau setidaknya mencapai kepentingan mereka dengan kemungkinan cost terendah. Teori ini secara esensial memandang setiap keputusan yang diambil oleh suatu aktor (negara) senantiasa berpijak pada pertimbangan *Benefit* dan *Cost*, sehingga akan memberikan keuntungan maksimal dalam meraih kepentingan nasionalnya. Pada

akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah secara akurat membandingkan kedua nilai tersebut, agar dapat menentukan tindakan yang paling menguntungkan Negara untuk memenuhi kepentingannya secara maksimal.

Berdasarkan dengan penjelasan Teori tersebut dapat diaplikasikan, Tiongkok sebagai Negara dengan kekuatan ekonomi dan kemampuan militer lebih dihadapi dengan pilihan antara menggunakan aksi militer atau sanksi ekonomi sebagai instrumen yang akan digunakan dalam tindakannya untuk menekan Korea Selatan terhadap isu kebijakan THAAD. Melalui *Rational Choice*, Pemerintah Tiongkok akan melihat pilihan mana yang memberikan lebih banyak keuntungan dan sedikit kerugian yang akan diterima. Terkait isu THAAD ini yang menjadi pertimbangan utama pemerintah Tiongkok adalah keamanan Negaranya, sehingga mereka akan memilih pilihan yang dapat memenuhi kepentingan Keamanan Negaranya namun secara langsung dapat memberi penekanan kuat terhadap Korea Selatan. Sanksi ekonomi kemudian dipilih oleh pemerintah Tiongkok sebagai instrumen yang lebih menguntungkan untuk digunakan ketimbang aksi militer.

Fakta dari menggunakan kekuatan militer sendiri salah satunya adalah dapat menimbulkan kericuhan yang tidak diinginkan. Militer dapat memicu Korea Selatan untuk membalas Tiongkok secara langsung yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perang senjata antar kedua Negara. Dalam iklim globalisasi, perang akan menciptakan bencana yang lebih besar ketimbang memperbaiki tatanan yang ada dan

menimbulkan ketidakstabilan dunia internasional yang mana konflik akan aksi militer mengorbankan jiwa serta memancing kemarahan negara lain karena penderitaan manusia yang disebabkan oleh kekerasan. Tentu Tiongkok tidak ingin hal tersebut terjadi, adu militer juga dapat mengancam keamanan Negara Tiongkok sendiri.

Dibanding dengan Sanksi ekonomi merupakan instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk menekan Negara lain agar berkompromi dengan kehendak Negeranya tanpa perlu melibatkan kekuatan militer dan memicu kekerasan yang tidak diinginkan antar Negara. Dengan begitu, dapat dilihat alasan yang kuat mengapa Tiongkok kemudian memilih menggunakan sanksi ekonomi untuk menekan Korea Selatan adalah Tiongkok melihat sanksi ekonomi sebagai pilihan yang paling menguntungkan untuk memenuhi kepentingannya dalam mempengaruhi keputusan Korea Selatan akan kebijakan THAAD.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

Tiongkok memilih strategi sanksi ekonomi dalam merespon kebijakan penempatan sistem THAAD di Korea Selatan, karena merupakan tindakan yang paling memberikan keuntungan sehingga dapat memenuhi kepentingan negaranya secara maksimal.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh penulis dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang akurat mengapa Tiongkok memilih sanksi ekonomi sebagai strateginya yang paling menguntungkan negaranya dalam merespon kebijakan penempatan sistem pertahanan rudal THAAD Korea Selatan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu lebih mengenai Tiongkok dan kepentingan nasionalnya.

Karya ilmiah ini juga bertujuan sebagai bukti hasil dari ilmu yang Peneliti dapatkan selama menjalani kuliah sampai 6 semester di UMY sebagai mahasiswi Hubungan Internasional, terutama dalam mata kuliah yang bersangkutan seperti isu-isu hubungan internasional, teori hubungan internasional dan pengantar kajian strategis. Serta sebagai tugas akhir perkuliahan Peneliti yang akan menjamin kelulusan Peneliti nanti.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi analisis, penelitian ini dibatasi oleh jangkauan waktu tertentu, tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2018, yang mana pada tahun 2016 merupakan awal munculnya isu antara Tiongkok dengan Korea Selatan akibat kebijakan THAAD, selanjutnya tahun 2017 yang menjadi tahun renggangnya hubungan diplomatik kedua negara akibat sanksi ekonomi yang ditetapkan Tiongkok terhadap Korea Selatan, kemudian pada tahun 2018, dimana Tiongkok dan Korea Selatan mulai menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua Negara. Sedangkan untuk bidang kajian, Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis menetapkan ruang lingkup dalam penelitian ini kepada kebijakan

THAAD Korea Selatan serta pilihan strategi sanksi ekonomi yang di keluarkan oleh Tiongkok sebagai responnya terhadap Kebijakan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai pilihan strategi sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Korea Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data Studi Dokumen dimana pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder, yang berasal dari buku, jurnal, artikel – artikel resmi yang bersumber dari internet, surat kabar, dll. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah, Teknik Analisa Kualitatif. Data yang relevan dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif, yakni dengan menghubungkan fenomena-fenomena yang satu dengan lainnya untuk menarik kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membagi karya ilmiah ini menjadi lima Bab dan masing-masing Bab nantinya memuat beberapa sub-Bab guna memberikan penjelasan lebih terperinci.

BAB I merupakan bagian pendahuluan dari penulisan karya ilmiah yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan pokok dalam karya ilmiah ini, kerangka teoritis yang membantu penulis dalam

memahami masalah dalam karya ilmiah ini, hipotesa sebagai hasil sementara karya ilmiah ini yang dibuat berdasarkan latar belakang masalah dan teori. Selain itu, Bab I juga berisi tentang tujuan penelitian, jangkauan penelitian serta metode penelitian.

BAB II merupakan bagian isi, yang mana membahas Tiongkok. Politik luar negeri Tiongkok dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, kekuatan Ekonomi dan Militer yang dimiliki. Serta strategi- strategi yang digunakan Tiongkok dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

BAB III merupakan bagian isi, yang menjelaskan tentang THAAD. BAB ini akan menjelaskan mengenai kebijakan Korea Selatan terkait penempatan sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) kemudian Respon Tiongkok terhadap kebijakan tersebut.

BAB IV Sanksi Ekonomi sebagai pilihan strategi Tiongkok dalam merespon kebijakan penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. BAB ini merupakan bagian isi, yang memaparkan lebih jelas sanksi ekonomi sebagai pilihan strategi Tiongkok. BAB ini juga membahas keberhasilan strategi sanksi ekonomi Tiongkok dalam memenuhi kepentingannya. Apa sajakah faktor penentu dari keberhasilan strategi tersebut dalam mempengaruhi Korea Selatan dan apakah dapat memenuhi kepentingan Tiongkok secara maksimal.

BAB V merupakan bagian dari penutup karya ilmiah ini. Dalam Bab ini penulis akan menyimpulkan inti dari karya ilmiah ini.

